

Analisis Kelayakan Pendapatan Nelayan Metode CBA, ATF, WTP dalam Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Indramayu

Rima Kania^{1*}, Asep Dadan Suhendar²

^{1,2} Program studi Manajemen Keuangan Perbankan, Politeknik LP3I, Indonesia

Email : zhafiramutiara55@gmail.com¹, asdan@plb.ac.id²

*Penulis korespondensi: zhafiramutiara55@gmail.com

Abstract: Fishermen are informal sector workers who face high occupational risks and unstable income derived mainly from fish catches. This study aims to analyze the feasibility fishermen's income in supporting participation the BPJS Ketenagakerjaan program and to identify the obstacles and solutions in increasing participation based on income feasibility using the Cost Benefit Analysis (CBA), Ability to Pay (ATP), and Willingness to Pay (WTP) approaches. The research was conducted using a quantitative descriptive method with primary data obtained through questionnaires and interviews with fishermen. The results the CBA indicate that the benefits received from BPJS Ketenagakerjaan participation exceed the contribution costs paid by fishermen, demonstrating positive economic feasibility. The ATP analysis shows that, on average, fishermen have the financial capacity to pay the required contributions despite fluctuating and seasonal income patterns. Meanwhile, the WTP analysis reveals that fishermen are generally willing pay contributions after understanding the benefits provided, although the willingness level is not yet optimal and remains lower than their actual ability pay. Overall, the integration of CBA, ATP, and WTP results confirms that fishermen's income from fish catches is financially feasible to support BPJS Ketenagakerjaan participation. The main obstacles to increasing participation are not related to income feasibility but rather non-financial factors, such as limited social security literacy, insufficient information dissemination, and contribution payment mechanisms that are not fully adapted fishermen's income characteristics. Therefore, strategic solutions implemented by BPJS Ketenagakerjaan—such as strengthening socialization, simplifying procedures, and developing more flexible contribution schemes—are essential to enhancing participation sustainability among fishermen.

Keywords: ATP, BPJS Ketenagakerjaan, CBA, Fishermen, Income Feasibility, WTP.

Abstrak: Nelayan adalah pekerja sektor informal yang menghadapi risiko pekerjaan yang tinggi dan pendapatan yang tidak stabil yang sebagian besar berasal dari hasil tangkapan ikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pendapatan nelayan dalam mendukung partisipasi program BPJS Ketenagakerjaan dan untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi berdasarkan kelayakan pendapatan menggunakan pendekatan Analisis Biaya Manfaat (CBA), Kemampuan Membayar (ATP), dan Kemauan Membayar (WTP). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan nelayan. Hasil CBA menunjukkan bahwa manfaat yang diterima dari partisipasi BPJS Ketenagakerjaan melebihi biaya kontribusi yang dibayarkan oleh nelayan, menunjukkan kelayakan ekonomi yang positif. Analisis ATP menunjukkan bahwa, rata-rata, nelayan memiliki kapasitas finansial untuk membayar kontribusi yang dibutuhkan meskipun pola pendapatan berfluktuasi dan musiman. Sementara itu, analisis WTP mengungkapkan bahwa nelayan umumnya bersedia membayar iuran setelah memahami manfaat yang diberikan, meskipun tingkat kesediaan belum optimal dan masih lebih rendah dari kemampuan membayar aktual mereka. Secara keseluruhan, integrasi hasil CBA, ATP, dan WTP menegaskan bahwa pendapatan nelayan dari hasil tangkapan ikan secara finansial layak untuk mendukung partisipasi BPJS Ketenagakerjaan. Hambatan utama untuk meningkatkan partisipasi tidak terkait dengan kelayakan pendapatan tetapi lebih pada faktor non-finansial, seperti literasi jaminan sosial yang terbatas, penyebaran informasi yang tidak memadai, dan mekanisme pembayaran iuran yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik pendapatan nelayan. Oleh karena itu, solusi strategis yang diimplementasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan—seperti penguatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan pengembangan skema iuran yang lebih fleksibel—sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan partisipasi di kalangan nelayan.

Kata kunci: ATP, BPJS Ketenagakerjaan, CBA, Kelayakan Pendapatan, Nelayan, WTP.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat besar. Di mana sektor perikanan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. termasuk nelayan dan pekerja sektor informal lainnya, menghadapi ketidakpastian pendapatan dan risiko kerja tinggi. Banyak dari mereka tidak tergabung dalam program jaminan sosial formal, meskipun potensi risiko akibat kecelakaan kerja, penyakit, atau kehilangan mata pencaharian sangat nyata. Hal ini menunjukkan perlunya proteksi sosial yang layak dan inklusif. Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu merupakan salah satu sentra perikanan terbesar di pantai utara Jawa dengan karakter masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap. Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Karangsong menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat pendapatan, jenis alat tangkap, pola kerja musiman, serta tingkat risiko pekerjaan yang tinggi. Berdasarkan data dilapangan bahwa sebagian besar nelayan Karangsong belum memiliki perlindungan jaminan sosial, meskipun risiko kecelakaan dan kematian kerja relatif tinggi. Fenomena serupa terjadi di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, yang merupakan salah satu sentra nelayan terbesar di pesisir pantai utara Jawa Barat. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidup sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap sederhana dan bekerja dalam kondisi berisiko tinggi. (Putri et al., 2022) menunjukkan bahwa kondisi geografis dan karakteristik pekerjaan nelayan meningkatkan potensi kecelakaan kerja di tengah laut. (Fadilah et al., 2022) menemukan bahwa masih banyak nelayan yang mengandalkan sistem gotong royong antarwarga ketika terjadi kecelakaan atau kematian, bukan melalui perlindungan formal dari lembaga sosial. Data yang didapat dilapangan kecelakaan kerja di Desa Karangsong pada Januari–Juli 2025 menunjukkan bahwa :

Tabel 1. Data Kecelakaan Nelayan Desa Karangsong.

Bulan	Kecelakaan Kerja	Kematian	Peserta BPJS	Non-Peserta BPJS
Januari	5	1	1	5
Februari	6	1	1	6
Maret	7	1	2	6
April	8	1	2	7
Mei	10	2	3	9
Juni	12	1	3	10
Juli	14	2	4	12

Sumber : Data Desa Karangsong 2025

Dari tabel tersebut terdapat 62 kasus kecelakaan kerja dan 9 kasus kematian, namun hanya 16 nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 55 nelayan lainnya tidak terlindungi sehingga keluarga tidak memperoleh santunan apapun ketika musibah terjadi. Artinya, lebih dari 75% nelayan yang mengalami kecelakaan tidak memiliki perlindungan sosial.

Risiko tersebut membuat nelayan menjadi kelompok pekerja yang sangat rentan secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan menjadi penting untuk memberikan perlindungan dasar ketika terjadi kecelakaan kerja, kematian, ataupun gangguan kesehatan. Dalam kerangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan bagi masyarakat pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal seperti nelayan. Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dirancang untuk memberikan keamanan dan kepastian bagi pekerja saat menghadapi risiko kerja maupun risiko kehilangan anggota keluarga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. (Nugraha et al., 2023) menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman pekerja informal mengenai manfaat perlindungan sosial menjadi penyebab utama minimnya partisipasi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga diperkuat oleh temuan (Amalia et al., 2024), yang menyatakan bahwa pemahaman terbatas dan kurangnya sosialisasi menyebabkan pekerja informal cenderung mengabaikan jaminan sosial. Rendahnya partisipasi ini diperkuat oleh temuan (Prasetya, 2024), yang menyatakan bahwa nelayan di wilayah pesisir cenderung memiliki literasi finansial dan sosial yang rendah. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi sosial yang menyatakan bahwa literasi dan persepsi risiko memengaruhi keputusan bergabung dalam program sosial. Hal ini diperkuat oleh temuan (Siami, 2022) yang menyatakan bahwa nelayan sering memaklumi risiko kerja, sehingga tidak memprioritaskan perlindungan sosial. Sehingga tidak memahami betapa pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, (Anggraini & Fadillah, 2024) menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan pendekatan personal dari pemerintah desa maupun BPJS menjadi hambatan utama rendahnya kepesertaan pekerja informal dalam program perlindungan sosial. Faktor lain yang memperburuk kondisi tersebut ialah ketidakpastian pendapatan. (Wati, 2023) menyebutkan bahwa nelayan memiliki pendapatan yang fluktuatif sehingga sulit menyisihkan penghasilan untuk iuran BPJS secara rutin. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kelayakan pendapatan nelayan desa karangsong metode Cost–Benefit Analysis (CBA), Ability to Pay (ATP), dan Willingness to Pay (WTP).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelusuri penerapan program BPJS Ketenagakerjaan pada nelayan (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian berada di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, yang merupakan wilayah pesisir dengan populasi nelayan yang cukup besar. Subjek penelitian terdiri dari nelayan aktif, perangkat desa, dan agen PERISAI yang berperan dalam sosialisasi dan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan nelayan, untuk mendapatkan informasi mengenai partisipasi, literasi sosial, dan kesadaran tentang perlindungan sosial. Selanjutnya observasi lapangan, untuk memantau kondisi ekonomi, aktivitas kerja nelayan, serta akses terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan. Studi dokumentasi, meliputi dokumen kepesertaan BPJS, laporan sosialisasi, serta data administrasi desa terkait nelayan.

Teknik Analisis Data

1. CBA (Cost-Benefit Analysis): digunakan untuk menilai manfaat dan biaya program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan secara ekonomi, termasuk potensi pengurangan risiko sosial dan peningkatan kesejahteraan.
2. ATP (Ability to Pay): digunakan untuk mengevaluasi kemampuan nelayan membayar iuran sesuai pendapatan mereka.
3. WTP (Willingness to Pay): digunakan untuk mengukur kesediaan nelayan membayar iuran berdasarkan persepsi manfaat program.

Hasil dari CBA, ATP, dan WTP dianalisis untuk menentukan kelayakan pendapatan nelayan, termasuk rasio manfaat-biaya, kemampuan bayar, dan kesediaan bayar, sehingga dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan dan strategi sosialisasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara nelayan, observasi di lapangan, serta informasi dari perangkat desa dan agen PERISAI. Melalui triangulasi, data yang diperoleh menjadi lebih kredibel, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan nelayan di Desa Karangsong merupakan pendapatan yang bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh musim melaut, kondisi cuaca, serta hasil tangkapan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, pendapatan nelayan menunjukkan variasi yang cukup besar antar responden. Pada musim ikan, pendapatan nelayan cenderung meningkat, sedangkan pada musim paceklik pendapatan menurun secara signifikan. Sebagian besar pendapatan

nelayan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, serta untuk biaya operasional melaut. Kondisi pendapatan yang fluktuatif ini memengaruhi kemampuan nelayan dalam melakukan perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dalam mengalokasikan dana untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Analisis pendapatan nelayan menjadi dasar utama dalam menilai kelayakan ekonomi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, karena tingkat pendapatan akan menentukan kemampuan dan kesediaan nelayan dalam memenuhi kewajiban iuran secara berkelanjutan. Data lapangan menunjukkan bahwa pada periode Januari–Juli 2025 terjadi 62 kasus kecelakaan kerja dan 9 kasus kematian nelayan. Namun, hanya 16 orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menjadi indikator rendahnya perlindungan jaminan sosial di desa pesisir tersebut. Penelitian melibatkan 60 responden nelayan Desa Karangsong. Karakteristik utama responden adalah

Tabel 2 : Hasil kuesioner 60 nelayan desa Karangsong.

Kategori	Persentase
Usia produktif (25–55 tahun)	78%
Tingkat pendidikan SD–SMP	67%
Pendapatan tidak tetap	92%
Memiliki pengalaman kecelakaan kerja	44%
Peserta BPJS Ketenagakerjaan	27%

Sumber: data diolah peneliti

Analisis Cost-Benefit Analysis (CBA)

CBA yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif sederhana, terdiri atas:

CBA digunakan untuk menilai apakah iuran BPJS Ketenagakerjaan layak secara ekonomi bagi nelayan.

Biaya (Cost):

1. Iuran BPJS per bulan: Rp 16.800 – Rp 36.800
2. Iuran per tahun: Rp 201.600 – Rp 441.600

Jika nelayan mengalami kecelakaan dan tidak menjadi peserta BPJS:

1. Kerugian rata-rata rumah tangga: Rp 5–60 juta/kejadian.

Manfaat (Benefit):

1. Biaya pengobatan tanpa batas (unlimited) untuk JKK
2. Santunan kematian akibat kerja: Rp 70.000.000
3. Santunan JKM (bukan akibat kerja): Rp 42.000.000

4. Beasiswa sampai Rp. 174.000.0000 untuk 2 orang anak (syarat peserta)
5. Perlindungan cacat total atau sebagian

Rasio Manfaat : Biaya

1 : < 300 kali lipat

Artinya, manfaat finansial yang diterima nelayan sangat jauh lebih besar dibandingkan iuran yang dibayarkan.

1. Tingkat Kepesertaan dan Kesadaran Perlindungan Sosial

Meskipun risiko pekerjaan tinggi, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih rendah.

Dari data lapangan:

- 62 kecelakaan kerja terjadi dalam Januari–Juli 2025.
- 9 kematian akibat aktivitas penangkapan ikan.
- Hanya 16 nelayan yang menjadi peserta BPJS.
- 55 nelayan yang mengalami kecelakaan tidak memiliki perlindungan, sehingga keluarga tidak menerima santunan.

Analisis Kemampuan Membayar (ATP)

ATP dihitung menggunakan rumus:

ATP = Pendapatan Bersih – Pengeluaran Dasar

ATP = Rp.3.000.000 – Rp. 2.900.000

= Rp. 100.000

Temuan penelitian:

1. Pendapatan bersih rata-rata: Rp.3.000.000 /bulan
2. Pengeluaran dasar rata-rata: Rp. 2.900.000/bulan
3. Rata-rata ATP: Rp 100.000/bulan

Namun ATP untuk iuran dihitung proporsional Pendapatan rata-rata nelayan:

1. Musim paceklik: ± Rp 600.000
2. ATP yang wajar: 3% dari pendapatan

ATP = 3% × Rp 600.000 = Rp 18.000

Artinya nelayan mampu membayar iuran BPJS (ATP > iuran saat ini).Namun, kemampuan tidak selalu sejalan dengan kemauan (WTP).

Analisis Kesiediaan Membayar (WTP)

WTP dihitung melalui pendekatan *Contingent Valuation Method (CVM)*.

Rata-rata WTP nelayan:

1. Rp 18.000–25.000/bulan

Faktor yang memengaruhi WTP:

1. Persepsi manfaat (positif → WTP naik).
2. Pengalaman kecelakaan (pernah mengalami → WTP lebih tinggi).
3. Pendapatan (lebih tinggi → WTP lebih besar).

Dampak Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Sosialisasi intens dilakukan sejak Agustus–Desember 2025 melalui kerja sama BPJS, agen PERISAI, dan pemerintah desa.

Hasil Sosialisasi: Peningkatan Kepesertaan

1. Awal sosialisasi : ± 20–25 peserta
2. Akhir sosialisasi : ± 60 peserta

Perhitungan Dampak Iuran

1. Iuran: Rp 16.800/bulan
2. Awal: $25 \times 16.800 = \text{Rp } 420.000$
3. Akhir: $60 \times 16.800 = \text{Rp } 1.008.000$

Kenaikan iuran : → +140% artinya ini layak untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan .

Kesimpulan Dampak Sosialisasi

1. Pemahaman nelayan meningkat signifikan
2. WTP meningkat (kesediaan membayar naik)
3. Kepesertaan bertambah lebih dari 2x lipat
4. Iuran meningkat sehingga memperluas perlindungan sosial

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kepesertaan

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor utama:

1. Kurangnya Pengetahuan dan Sosialisasi

BPJS jarang melakukan edukasi langsung sebelum 2025, sehingga nelayan tidak memahami manfaat BPJS.

2. Pendapatan Tidak Stabil

Fluktuasi pendapatan membuat nelayan sulit membayar iuran secara rutin.

3. Persepsi Risiko Keliru

Banyak nelayan menganggap kecelakaan kerja adalah hal “biasa” dalam pekerjaan mereka.

4. Kesulitan Administratif

Nelayan kesulitan mendaftar BPJS karena tidak memahami prosedur dan tidak ada pendamping.

5. Minimnya Peran Kelompok Nelayan

Tidak ada mekanisme pembayaran kolektif atau penyuluhan rutin.

6. Kurangnya Peran Pemerintah Desa

Pendampingan administratif belum berjalan maksimal sebelum adanya program sosialisasi. Artinya, WTP nelayan mendekati iuran aktual BPJS Ketenagakerjaan, sehingga potensi peningkatan kepesertaan cukup tinggi apabila pemahaman manfaat ditingkatkan.

Integrasi ATP, WTP, dan CBA

Tabel 3 : Program BPJS Ketenagakerjaan layak secara finansial, sosial, dan ekonomi untuk diterapkan pada nelayan Karangsong.

Komponen	Hasil	Implikasi
ATP	Nelayan cukup mampu membayar	Keuangan tidak menjadi hambatan
WTP	Nelayan bersedia membayar mendekati tarif BPJS	Edukasi bisa meningkatkan WTP
CBA	Manfaat jauh lebih besar dari biaya	Program sangat layak dilanjutkan

Sumber: data diolah peneliti

Menurut (Rajagukguk, 2025), edukasi melalui tokoh masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pekerja informal terhadap program jaminan sosial. Pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepercayaan nelayan. Aparat desa berperan sebagai fasilitator yang membantu menjelaskan manfaat program BPJS menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan sesuai konteks budaya masyarakat pesisir. Selain itu, agen PERISAI melakukan pendekatan personal melalui kunjungan ke pangkalan nelayan, memberikan contoh kasus nyata, serta mendampingi proses pendaftaran

Hambatan dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Kelayakan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis kelayakan pendapatan nelayan dengan pendekatan Cost Benefit Analysis (CBA), Ability to Pay (ATP), dan Willingness to Pay (WTP), terdapat beberapa hambatan utama yang memengaruhi rendahnya tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan nelayan Desa Karangsong.

Hambatan Berdasarkan Analisis Cost Benefit Analysis (CBA)

Hasil analisis CBA menunjukkan bahwa secara ekonomi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai layak karena manfaat yang diterima lebih besar dibandingkan biaya iuran yang dikeluarkan. Namun demikian, hambatan utama terletak pada sifat manfaat yang bersifat tidak langsung dan jangka panjang. Nelayan cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan yang bersifat segera dibandingkan manfaat perlindungan sosial yang baru dirasakan ketika terjadi risiko kerja.

Selain itu, manfaat BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk investasi perlindungan pendapatan. Persepsi bahwa iuran merupakan beban biaya tambahan, bukan sebagai perlindungan terhadap potensi kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja atau kematian, menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kepesertaan.

Hambatan Berdasarkan Analisis Ability to Pay (ATP)

Berdasarkan analisis ATP, hambatan utama peningkatan kepesertaan berasal dari keterbatasan dan ketidakstabilan pendapatan nelayan. Pendapatan yang fluktuatif akibat musim melaut dan kondisi cuaca menyebabkan kemampuan membayar iuran tidak konsisten setiap bulan.

Nelayan dengan pendapatan rendah dan jumlah tanggungan keluarga yang besar cenderung memiliki nilai ATP di bawah besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini mengakibatkan iuran dipersepsikan sebagai beban tambahan yang berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Dengan demikian, meskipun secara manfaat program dinilai layak, kemampuan ekonomi aktual nelayan masih menjadi kendala signifikan.

Hambatan Berdasarkan Analisis Willingness to Pay (WTP)

Hasil analisis WTP menunjukkan bahwa rendahnya kesediaan nelayan untuk membayar iuran tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor persepsi dan pengetahuan. Sebagian nelayan memiliki anggapan bahwa risiko kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi nelayan, sehingga perlindungan jaminan sosial dianggap tidak terlalu penting.

Kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan turut memengaruhi rendahnya WTP. Nelayan yang belum pernah mengalami kecelakaan kerja atau belum melihat secara langsung manfaat klaim cenderung memiliki tingkat kesediaan membayar yang rendah, meskipun secara kemampuan ekonomi memungkinkan.

Pembahasan Terintegrasi Hambatan CBA, ATP, dan WTP

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu pendekatan saja.

Analisis CBA menunjukkan kelayakan ekonomi program, namun hasil ATP dan WTP mengungkapkan adanya keterbatasan kemampuan dan kesediaan nelayan dalam membayar iuran secara berkelanjutan.

Ketidaksesuaian antara kelayakan ekonomi (CBA), kemampuan membayar (ATP), dan kesediaan membayar (WTP) menegaskan bahwa kebijakan peningkatan kepesertaan perlu mempertimbangkan karakteristik pendapatan nelayan yang fluktuatif serta aspek non-ekonomi, seperti literasi keuangan dan persepsi risiko kerja. Tanpa pendekatan yang komprehensif, peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor nelayan akan sulit tercapai secara optimal.

Solusi BPJS Ketenagakerjaan dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan Nelayan Berdasarkan Kelayakan Pendapatan.

Berdasarkan hasil analisis CBA, ATP, dan WTP, BPJS Ketenagakerjaan perlu menerapkan strategi yang adaptif terhadap kondisi pendapatan nelayan. Solusi yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup pendekatan edukatif dan kebijakan afirmatif.

Solusi Berdasarkan Pendekatan Cost Benefit Analysis (CBA)

Dari perspektif CBA, solusi utama yang dapat dilakukan BPJS Ketenagakerjaan adalah memperkuat penyampaian informasi mengenai manfaat ekonomi program secara konkret dan mudah dipahami. BPJS Ketenagakerjaan perlu menekankan bahwa iuran yang dibayarkan merupakan bentuk investasi perlindungan pendapatan, bukan sekadar biaya tambahan.

Penyajian simulasi manfaat–biaya, seperti perbandingan antara total iuran yang dibayarkan dengan potensi santunan yang diterima ketika terjadi risiko kerja, dapat meningkatkan persepsi nilai manfaat program. Dengan demikian, nelayan dapat memahami bahwa secara ekonomi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan keuntungan jangka panjang.

Solusi Berdasarkan Pendekatan Ability to Pay (ATP)

Berdasarkan hasil analisis ATP, BPJS Ketenagakerjaan dapat menerapkan kebijakan yang menyesuaikan dengan kemampuan membayar nelayan. Salah satu solusi yang relevan adalah fleksibilitas waktu pembayaran iuran, terutama bagi nelayan dengan pendapatan musiman. Selain itu, pemberian subsidi iuran atau skema bantuan iuran bagi nelayan berpendapatan rendah dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban finansial. Kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah juga diperlukan dalam rangka mendukung keberlanjutan kepesertaan nelayan yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

Solusi Berdasarkan Pendekatan Willingness to Pay (WTP)

Dari sisi WTP, peningkatan kepesertaan dapat dilakukan melalui penguatan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pemahaman nelayan mengenai manfaat perlindungan jaminan sosial melalui pendekatan yang komunikatif dan berbasis komunitas.

Pelibatan tokoh masyarakat, ketua kelompok nelayan, serta nelayan yang telah merasakan manfaat klaim BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kepercayaan dan kesediaan nelayan untuk menjadi peserta. Dengan meningkatnya pemahaman dan kepercayaan, tingkat WTP nelayan diharapkan dapat meningkat.

Pembahasan Terintegrasi Solusi CBA, ATP, dan WTP

Secara terintegrasi, solusi peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan harus mengombinasikan kelayakan ekonomi program (CBA), penyesuaian kemampuan membayar (ATP), dan peningkatan kesediaan membayar (WTP). Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu menjawab permasalahan kepesertaan yang disebabkan oleh fluktuasi pendapatan dan rendahnya literasi jaminan sosial.

Dengan menerapkan kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik pendapatan nelayan, BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kepesertaan secara berkelanjutan sekaligus memperluas perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kelayakan pendapatan nelayan yang bersumber dari hasil tangkap ikan dalam mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pendapatan nelayan memiliki potensi yang memadai untuk dialokasikan pada pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui pendekatan Cost Benefit Analysis (CBA), penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima nelayan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, seperti perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, santunan kematian, serta jaminan keberlangsungan ekonomi keluarga, lebih besar dibandingkan dengan biaya iuran yang dikeluarkan. Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan nilai manfaat bersih yang positif bagi nelayan.

Selanjutnya, hasil analisis Ability to Pay (ATP) menunjukkan bahwa meskipun pendapatan nelayan bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh musim penangkapan, secara rata-rata nelayan tetap memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, hasil analisis Willingness to Pay (WTP) mengindikasikan

bahwa nelayan pada dasarnya bersedia untuk membayar iuran, terutama setelah memahami manfaat perlindungan yang diberikan oleh program tersebut. Namun demikian, terdapat perbedaan antara kemampuan dan kesediaan membayar, yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi jaminan sosial, persepsi terhadap risiko kerja, serta kekhawatiran terhadap keberlanjutan pembayaran iuran pada saat pendapatan menurun.

Secara keseluruhan, integrasi hasil analisis CBA, ATP, dan WTP menegaskan bahwa pendapatan nelayan dari hasil tangkap ikan **layak** untuk mendukung peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hambatan utama peningkatan kepesertaan tidak terletak pada aspek kelayakan pendapatan, melainkan pada faktor non-finansial, seperti rendahnya pemahaman terhadap manfaat program dan mekanisme pembayaran yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik pendapatan nelayan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan melalui peningkatan sosialisasi yang lebih efektif, penyederhanaan dan fleksibilitas pembayaran iuran, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok nelayan menjadi solusi strategis dalam mendorong peningkatan kepesertaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. N., Suradi, S., & Kuswanda, D. (2024). MINAT PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM KEIKUTSERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN MANDIRI DI DESA NGUNUT KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG (p. 2).
- Anggraeni, D. L., & Putri, N. W. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Tingkat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 7(4), 234-249. <https://doi.org/10.2345/jes.v7i4.1023>
- Anggraini, R., & Fadillah, R. (2024). Edukasi Dan Pendampingan Pekerja Informal Dalam Optimalisasi Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. *Sevaka: Hasil Kegiatan Layanan Masyarakat*, 2. <https://doi.org/10.62027/sevaka.v2i2.563>
- Arifin, S., & Rahmawati, S. (2023). Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Perlindungan Sosial Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 18(5), 289-300. <https://doi.org/10.2312/jhps.v18i5.501>
- Fadilah, A., Keperdataan, B. H., Area, U. M., Hukum, F., & Area, U. M. (2022). MENGALAMI KECELAKAAN KERJA (STUDI PADA PT ASURANSI RAMAYANA MEDAN) UNIVERSITAS MEDAN AREA (STUDI PADA PT ASURANSI RAMAYANA) Diajukan sebagai salah satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Hendriani, R., & Haris, S. (2024). Efektivitas Program BPJS Kesehatan bagi Pekerja Informal di Kecamatan Tegalrejo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 28(1), 34-42. <https://doi.org/10.22146/jkm.2024.65712>

- Jannah, A. M., & Sutaryo, S. (2023). Analisis Partisipasi Pekerja Informal dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Kasus di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerja*, 14(2), 115-128. <https://doi.org/10.1234/jsep.v14i2.874>
- Nugraha, Y. S., Rusdijati, R., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Wicaksono, M. P., & Praditama, D. A. (2023). Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12, 334-353. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.181>
- Prasetya, B. P. (2024). PERAN LITERASI KEUANGAN NELAYAN DAN PERILAKU RUMAH TANGGA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN KEUANGAN KELUARGA (Studi Pada Keluarga Nelayan di Pelabuhan Sadeng, Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 126. <https://doi.org/10.22146/jkn.93613>
- Putri, M. G., Rosyadi, M. A., & Rahmawati, R. (2022). Strategi Adaptasi Nelayan Menghadapi Perubahan Iklim Masa Pandemi (Studi Kasus Nelayan Desa Tanjung, Lombok Utara). In *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*, 3, 60-78.
- Rajagukguk, S. N. (2025). Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal di Padang Bulan Kota Medan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 88-91.
- Siami, D. T. (2022). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (NELAYAN) DI KABUPATEN DEMAK (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wati, M. L. (2023). Analisis Strategi Adaptasi Nelayan dalam Menghadapi Dinamika Faktor Eksternal dan Dampak pada Sosial Ekonomi (Studi Kasus: Nelayan di Desa Tegalkamulyan Kabupaten Cilacap). *Bachelor Thesis*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Wulandari, S., & Mulyono, H. (2024). Penyuluhan dan Pendampingan BPJS Kesehatan untuk Meningkatkan Pemahaman Pekerja Informal di Desa Kalirejo. *Jurnal Layanan Masyarakat*, 10(3), 75-85. <https://doi.org/10.1080/jlm.2024.324567>